

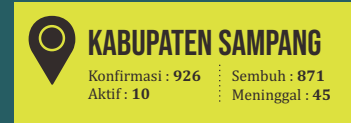
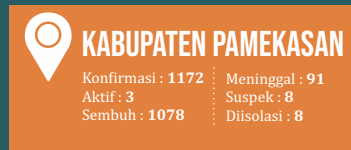
PETAKA CORONA INGGRIS DESAKAN 'PENGUNCIAN' MADURA

Penyebaran infeksi Covid-19 di Bangkalan, Jawa Timur (Jatim) belum reda. Ancaman makin besar setelah Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair) menemukan mutasi Corona varian alpha (Varian B117 Inggris) dari sampel tes pasien. Varian baru ini mampu meningkatkan penularan 40% sampai 90% dalam waktu yang cepat. Studi kasus di Amerika Serikat, 100 kasus menjadi 200 dalam waktu 10 hari. Saat ini untuk melokalisir penyebarannya, dilakukan penyekatan ketat di Jembatan Suramadu dan penyeberangan Kamal, penghubung Pulau Jawa dan Madura. Epidemiolog menyarankan, bila kasus positif merata di seluruh Madura, pemerintah disarankan melakukan karantina pulau (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep).

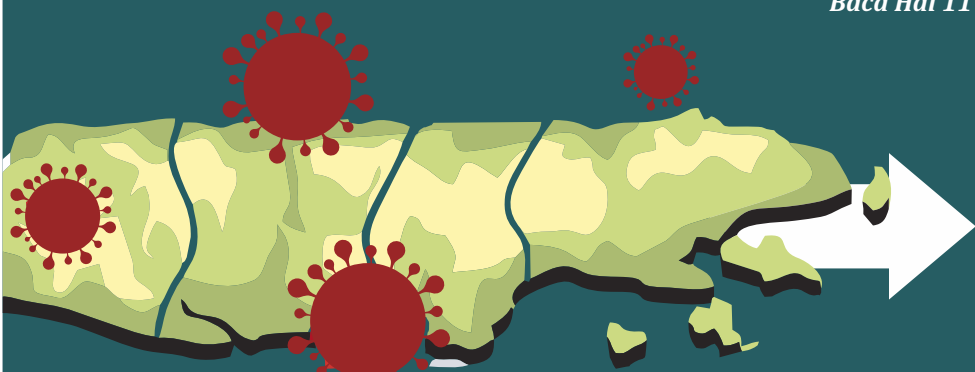
Baca Hal 11

PENYEBARAN COVID-19

DI BANGKALAN DAN SEKITARNYA



Sumber: <http://infocovid19.jatimprov.go.id/>





Gambaran kemiskinan di Indonesia masih tampak nyata di berbagai wilayah.

TARGETKAN ORANG MISKIN RI 8,5% TAHUN DEPAN, BISA?

Jakarta - Komisi XI DPR RI dan pemerintah sepakat tingkat kemiskinan akan ditekan sampai di kisaran 8,5 hingga 9,0% pada tahun depan. Angka tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja antara Komisi XI dan pemerintah yang digelar sore ini, Selasa (8/6).

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 5,5% hingga 6,3%. Selanjutnya, gini rasio berada di level 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia disepakati pada angka 73,41 hingga 73,46.

"Dengan demikian kita setuju semua kesimpulan rapat pada sore hari ini," kata Ketua Komisi XI Dito Ganinduto.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah orang miskin naik menjadi 27,55 juta orang atau setara 10,19% di September 2020. Kenaikan angka kemiskinan ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang sudah melanda tanah air sejak Maret 2020.

"Dengan berbagai peristiwa tersebut, pada September 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia 27,55 juta orang atau setara 10,19%," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam video conference, Senin (15/2).

Berdasarkan data BPS, Suhariyanto mengatakan angka kemiskinan pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang atau setara 9,78%, sedangkan di September 2020 tercatat sebanyak 27,55 juta orang atau setara 9,22%. Jika dihitung, maka terjadi kenaikan orang miskin sebanyak 1,13 juta orang dari Maret 2020 dan 2,76 juta orang dari September 2020. "Jika dilihat secara year-on-year, persentase dari 9,22% menjadi 10,19 atau naik 0,97%, terhadap September 2020" jelasnya.

PBB Sebut 100 Juta Pekerja Jatuh Miskin

Sebelumnya Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) mengatakan pandemi telah mendorong lebih dari 100 juta pekerja ke dalam kemiskinan. Ini akibat jam kerja yang berkurang dan akses ke lapangan pekerjaan berkualitas baik menguap.

Dalam sebuah laporan, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) PBB memperingatkan bahwa krisis pasar tenaga kerja diciptakan oleh pandemi dan isu ini masih jauh dari selesai. Lapangan pekerjaan diperkirakan bangkit kembali ke tingkat pra-pandemi paling cepat pada 2023.

Laporan tahunan ILO tentang Ketenagakerjaan dan Sosial menunjukkan bahwa planet ini akan kekurangan 75 juta pekerjaan di akhir tahun ini dibandingkan jika pandemi tidak terjadi. Angka itu belum termasuk 23 juta pekerjaan yang berkurang pada akhir tahun depan.

"(Covid-19) tidak hanya menjadi krisis kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan krisis ketenagakerjaan dan manusia," Dirjen ILO Guy Ryder. "Tanpa upaya yang disengaja

untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja yang layak, serta mendukung anggota masyarakat yang paling rentan, dan pemulihan sektor ekonomi yang paling terpuak, efek yang tersisa dari pandemi bisa (tetap) bersama kita selama bertahun-tahun dalam bentuk hilangnya potensi manusia dan ekonomi, juga kemiskinan yang lebih tinggi dan kesenjangan," jelasnya.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa pengangguran global diperkirakan mencapai 205 juta orang pada 2022, jauh lebih tinggi dari 187 juta pada 2019. Tetapi situasinya lebih buruk daripada yang ditunjukkan oleh angka pengangguran resmi. Banyak orang telah mempertahankan pekerjaan mereka, tetapi dengan jam kerja yang dipotong secara drastis.

Pada 2020, 8,8% jam kerja global hilang dibandingkan dengan kuartal IV-2019, setara dengan 255 juta pekerjaan penuh waktu. Sementara situasinya telah membaik, jam kerja global masih jauh dari pulih. Dunia akan tetap kekurangan lapangan pe-

kerjaan setara dengan 100 juta pekerjaan penuh waktu pada akhir tahun ini, menurut temuan laporan tersebut.

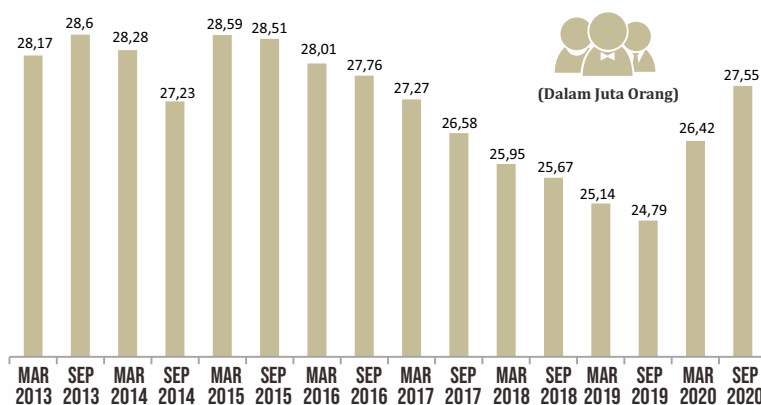
Sementara lapangan kerja global diperkirakan akan pulih lebih cepat pada paruh kedua 2021, asalkan situasi pandemi secara keseluruhan tidak memburuk, ILO memperingatkan pemulihan akan sangat tidak merata. Ini, katanya, dikarenakan akses yang tidak merata ke vaksin Covid-19. Sejauh ini, lebih dari 75% dari seluruh suntikan hanya dibagikan ke 10 negara.

Dibandingkan pada 2019, sebanyak 108 juta lebih pekerja di seluruh dunia dikategorikan miskin atau sangat miskin. Artinya, mereka dan keluarganya hidup dengan kurang dari US\$3,20 per orang per hari, studi menunjukkan.

"Angka kemiskinan benar-benar dramatis," kata Ryder, memperingatkan bahwa lima tahun kemajuan menuju pemberantasan kemiskinan di tengah para pekerja belum rampung. (ist)

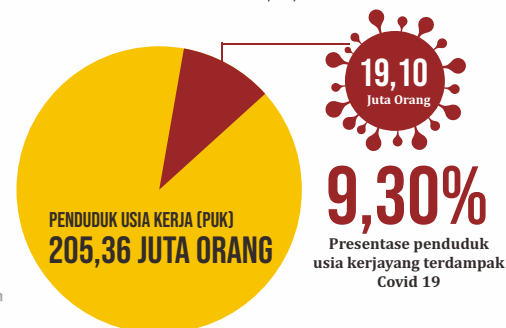
PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA SEPTEMBER 2020

Berita Resmi Statistik No.16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021



KEADAAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA FEBRUARI 2021

Berita Resmi Statistik No. 37/05/Th. XXIV, 5 Mei 2021



PASAL PENGHINAAN PRESIDEN-DPR RUU KUHP 'HUJAN' KRITIKAN

Jakarta-Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam draf RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara.

Tak hanya itu, kini bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR juga bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara. RUU inipun langsung 'hujan' kritik baik dari pegiat demokrasi maupun internal DPR RI sendiri.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto misalnya, menilai perlu dikaji dan dipertimbangkan secara mendalam terkait keberadaan pasal tersebut. "Perlu dikaji dan dipertimbangkan lebih dalam lagi baik dalam perspektif konstitusionalnya maupun kemanfaatannya," kata Didik di Jakarta, Selasa (8/6).

Dia menjelaskan, dalam perspektif konstitusionalitas pasal penghinaan presiden dalam KUHP sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, kalau ada putusan MK yang sudah dibatalkan, kemudian dibangkitkan lagi maka bisa menimbulkan krisis konstitusi. "Dibatalkan, kemudian dimunculkan, lalu diuji kembali, bisa jadi dibatalkan lagi. Potensi munculnya ketidakpastian hukum akan terus terjadi, padahal putusan MK bersifat final," ujarnya.

Didik menilai hal yang lumrah dan biasa saja ketika rakyat terus bersuara dan mengkritik keras untuk perbaikan sehingga tidak perlu sensitif berlebihan karena itu dengarkan saja dan lakukan perbaikan.

Dari luar senayan, Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) juga menyayangkan dan menolak masuknya delik penghinaan presiden dan DPR dalam RUU-KUHP. "Pasal penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU-KUHP mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat," kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6).

PSI tak melihat relevansi pasal-pasal semacam itu diterapkan di era demokrasi saat ini. Indonesia justru akan mundur puluhan tahun jika menerapkannya. "Kalau dalam konteks pasal penghinaan Presiden, Pak Jokowi dari dulu biasa difitnah, tapi beliau selalu menjawab dengan kerja. Kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara. Itu pula yang seharusnya dilakukan DPR. Kalau ada yang mengkritik DPR, tunjukkan dengan perbaikan kinerja," lanjut mahasiswa S2 New York University tersebut.

Hal senada diungkapkan, Ketua Yayasan lembaga hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. "Ini aneh banget sih," katanya. Asfinawati mengatakan pasal itu menunjukkan kalau Pemerintah dan DPR antikritik. Menurutnya hal itu juga tak sesuai dengan UUD 1945.

Asfinawati juga menilai pasal itu bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat setiap orang. Dia berharap pasal itu dihapus. "Sangat bertentangan. Kita kan negara pihak Kovenan Hak Sipil Politik, terlebih amandemen Konstitusi sudah memasukkan HAM. Harus dihapus pasal-pasal penjajah begini," ujarnya. (ist)



Massa mengkritisi RKUHP terutama terkait pasal penghinaan Presiden dan Wapres serta DPR dinilai mengancam demokrasi.

RUU KUHP TERKAIT PENGHINAAN PRESIDEN-DPR

Pasal 218

1. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempatkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 220

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 354:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarkan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pembahasan LKPJ APBD 2020 Kabupaten Blitar

KINERJA DINILAI 'MELEMPEM', DPRD DESAK RSUD SRENGAT JADI BLUD

BLITAR - RSUD Srengat Kabupaten Blitar kembali mendapatkan sorotan dari para wakil rakyat. Sebanyak 3 dari 5 fraksi di DPRD menyoroti kinerja Rumah Sakit tersebut dalam Pandangan Umum (PU) pada rapat Paripurna pembahasan Ranperda LKPJ APBD 2020.

"RSUD Srengat, agar segera bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga bisa mandiri mengelola pendapatan. Yang akhirnya berdampak pada bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar juru bicara FGD (Golkar dan Demokrat), Endah dari Partai Demokrat Selasa (8/6/2021).

Demikian juga FPAN menyampaikan kritikan terhadap RSUD Srengat agar bisa bersaing dengan RS swasta lainnya, dengan melakukan pembenahan. "Baik sumber daya manusia yang berkualitas, maupun pelayanan. Mencari terobosan, agar dikenal dan masyarakat tertarik mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Selain itu FPAN juga mendorong agar RSUD Srengat segera menjadi BLUD," tutur

juru bicara FPAN, Andi Widodo.

Selain RSUD Srengat FPAN juga mendesak agar adanya 12 temuan atas audit BPK, segera ditindaklanjuti serta menjadi dasar evaluasi kinerja OPD.

Terakhir FPDIP melalui juru bicaranya, Budi Kusuma Jaya juga meminta agar RSUD Srengat segera menjadi BLUD, agar tidak membebani APBD. "Agar memberikan pelayanan lebih baik, serta rajin melakukan promosi dan sosialisasi bahwa sudah bisa melayani pasien umum dan BPJS," tandas Budi.

Fraksi PDIP juga memberikan saran agar PAD pada tahun 2020 sebesar Rp 302 miliar bisa ditingkatkan, dengan memaksimalkan potensi yang ada pungkasnya.

Untuk diketahui, rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito. Didampingi Wakil Ketua DPRD, Abdul Munib dan Mujib, rapat ini dihadiri 36 dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Blitar, yang terdiri dari 5 fraksi yakni FPDIP, FPKB, FPAN, FGPN (Gerindra, Nasdem, PPP dan PKS) dan FGD (Golkar dan

Demokrat). Tak ketinggalan, Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekda Izul Marom, Forkopimda Kabupaten Blitar dan jajaran OPD juga hadir baik secara langsung maupun virtual.

Secara umum kelima fraksi mengapresiasi atas keberhasilan Pemkab Blitar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas audit Laporan Keuangan APBD 2020 oleh BPK RI selama 5 tahun berturut-turut sejak 2016.

Fraksi GPN melalui juru bicaranya, Anshori Baidowi dari Partai PPP menyampaikan bahwa predikat WTP tidak selalu identik dengan keberhasilan pembangunan, terutama terkait janji politik Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang tercantum dalam visi misi san Panca Bhakti. "Terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Karena masih adanya keluhan warga terkait



Lima fraksi DPRD Kab Blitar menyampaikan Pandangan Umum (PU) pada Paripurna Raperda LKPJ APBD 2020, Selasa (8/6/2021).

Foto: Arief Sukaputra/LenteraToday

infrastruktur, bahkan ada spanduk Kapan Jalanku Secantik Bupatiku," katanya.

Sementara FPKB, sekadar menyampaikan apresiasi, atas kinerja Pemkab Blitar sehingga bisa meraih opini atau predikat WTP atas audit BPK RI. "Oleh karena itu, atas keberhasilan OPD teknis yang mampu berkontribusi atas predikat tersebut diberikan reward," ungkap Adib Makarim. (Ais)

PEMERINTAH AKAN REVISI UU ITE SECARA TERBATAS, PASAL APA SAJA?

Jakarta- Pemerintah akan segera mengajukan revisi terbatas terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke DPR. Menkopohukam Mahfud MD mengatakan, revisi terbatas bakal dilakukan pada 5 pasal UU ITE.

Mahfud menyebut, keputusan Revisi UU ITE didasarkan pada Keputusan Kemenkumham Nomor 22 Tahun 2021 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Kemenkopohukam Nomor 25 Tahun 2021.

"Revisi terhadap UU ITE akan dilakukan revisi terbatas yang menyangkut substansi. Ada empat pasal yang akan direvisi yaitu pasal 27, 28, 29, dan pasal 36. Ditambah satu pasal 45C itu tambahannya," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (8/6).

Ia mengatakan keputusan revisi terbatas merupakan hasil kerja tim yang dibentuk pemerintah untuk mengkaji Revisi UU ITE. Tim ini sebelumnya telah mengkaji kemungkinan revisi dan membuat kriteria implementasi.

Mahfud menjelaskan, berdasarkan kajian pemerintah, revisi terbatas bertujuan untuk meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap isi pasal.

"Itu semua untuk, satu menghilangkan multi tafsir, menghilangkan pasal karet, dan menghilangkan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi. Kata masyarakat sipil diskriminasi kriminalisasi, makanya kita perbaiki. Tanpa mencabut UU itu karena UU itu masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi kita lewat dunia digital," ucap Mahfud.

Tim kajian itu, kata Mahfud, terdiri dari 55 orang dan merupakan unsur

pemerintah, DPR, parpol, serta masyarakat. Selain itu, para pelapor terjadinya tindak pidana ITE, para korban, hingga aktivis dan praktisi turut dilibatkan.

"Kementerian dan lembaganya ada 6, Kemenkominfo, Polri, Kejaksaan, MA, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kemenkumham. Nah itu yang ikut. Hasilnya itu tadi dilakukan revisi terbatas untuk jangka pendek," beber dia.

"Kita tidak memperluas UU itu tapi undang-undangnya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetinya itu, yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut Presiden Jokowi sudah menyetujui rencana revisi 5 pasal di UU ITE ini. Selanjutnya, pemerintah akan mengusulkan ke DPR sesuai proses legislasi yang berlaku.

"Itu yang satu selesai ini laporan ke Presiden dan ini nanti akan dimasukkan melalui proses legislasi, akan dikerjakan oleh Kemenkumham untuk penyerasian atau untuk sinkronisasi dan dimasukkan ke proses legislasi berikutnya," tutup Mahfud.

Rancang Omnibus Law Digital

Selain itu, Mahfud mengatakan saat ini pemerintah tengah merancang Undang-undang (UU) yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. UU ini akan berbentuk seperti Omnibus Law tapi di bidang digital.

Berbeda dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kata Mahfud, Omnibus Law ini nantinya akan lebih luas dan mencakup semua hal yang berkaitan dengan perkembangan digital.



Menkopohukam,
Mahfud MD

Foto: Istimedia

"Kita memutuskan untuk membuat Omnibus Law di bidang elektronik, di samping yang sudah ada. Itu akan segera dikaji ulang agar kita mempunyai kekuatan pertahanan di dunia digital," ujarnya.

Rencana pembentukan Omnibus Law bidang elektronik ini bermula dari sejumlah paparan yang disampaikan Badan Intelejen Negara (BIN) berkaitan dengan perkembangan digitalisasi yang semakin pesat. Terlebih, undang-undang yang sudah ada saat ini tidak serta merta dapat mengatur berbagai hal yang ada di dunia digital.

Karenanya diperlukan satu undang-undang khusus yang disusun untuk mencakup banyak hal berkaitan dengan dunia digital. "Kan harusnya ada perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi

elektronik ini. Meskipun namanya Undang-undang transaksi dan elektronik, ini kan tidak ada transaksi dalam arti uang," ucap Mahfud.

"Nah nanti itu akan diatur semua melalui suatu Undang-undang yang lebih komprehensif," sambungnya. Kendati demikian, Mahfud mengatakan dibutuhkan waktu yang lebih panjang dalam penyusunan Omnibus Law bidang elektronik agar lebih komprehensif. Selain itu, ia menekankan tujuan dari rancangan Omnibus Law ini juga untuk memperkuat pertahanan di dunia digital.

"Sekarang kan banyak tuh serangan intelijen, serangan terhadap pertahanan kita dan sebagainya, masih banyak yang bolong-bolong. Nah ini (rencana) yang jangka panjang," tutupnya. (ist)

PASAL UU ITE YANG BAKAL DIREVISI TERBATAS

PASAL 27 AYAT (3)

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik".

PASAL 29

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi."

PASAL 28 AYAT (2)

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

PASAL 36

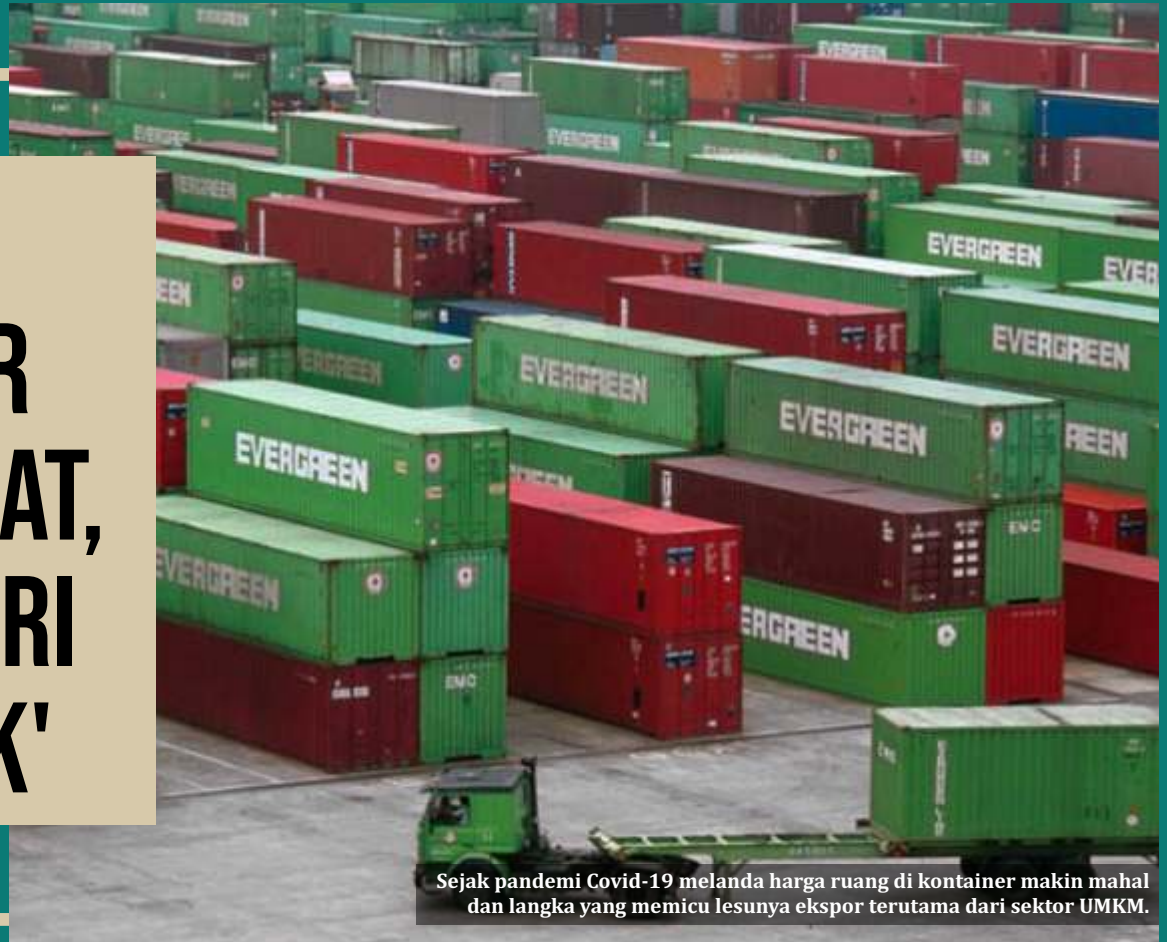
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain."

PASAL 45 B

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000."



BIAYA KONTAINER NAIK BERLIPAT, EKSPORTIR RI 'BERTERIAK'



Sejak pandemi Covid-19 melanda harga ruang di kontainer makin mahal dan langka yang memicu lesunya ekspor terutama dari sektor UMKM.

Jakarta-Di tengah pandemi Covid-19 dan belum pulihnya perekonomian, eksportir Indonesia mulai 'berteriak'. Pemicunya adalah biaya pengiriman kontainer yang mahal.

Eksportir mengungkapkan harga biaya kontainer naik berkali-kali lipat untuk ke beberapa negara tujuan, seperti Australia, Eropa, Timur Tengah, juga Amerika Serikat. Hal ini perlu jadi perhatian pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto mengatakan eksportir yang paling terdampak adalah eksportir kecil seperti UMKM, biaya logistik bisa lebih mahal dibandingkan harga jual produknya. "Yang kasihan ya eksportir kecil, seperti produk-produk furniture, tekstil dan lainnya, harga ongkos kirim bisa lebih mahal dari harga jual produknya," jelasnya, Selasa (8/6).

Ia bilang masih sedikit pelaku UMKM yang saat ini mau melakukan ekspor karena ongkos kirim yang tinggi sehingga produknya tidak bisa bersaing dengan produk lainnya. Mahendra mengatakan ekspor yang ada saat ini karena sudah ada kontrak tahunan. Sehingga mau tidak mau harus mengirimkan barang, karena kemungkinan tidak berdampak sebab ada hedging dari kontrak sebelumnya.

Menurutnya UMKM lokal harus dilindungi saat ini, karena satu-satunya pasar yang potensial ada di dalam negeri. Saat ini harga pengiriman kontainer laut dengan estimasi harga pengiriman ke Eropa US\$ 8.500 untuk ukuran kontainer 40 kaki, dan US\$ 6.000 untuk ukuran 20 kaki. Sedangkan ke Amerika senilai US\$ 14.000 untuk ukuran 40 kaki, dan US\$ 9.500 untuk ukuran 20 kaki, sementara ke Australia US\$ 4.200

untuk kurang dari 40 kaki dan US\$ 2.900 untuk ukuran 20 kaki.

Sebelumnya Mahendra membenarkan ada kenaikan tarif pengiriman kontainer. Dia mencontohkan pengiriman barang yang mau dilakukan dari kantornya ke Australia dari Semarang biayanya sudah membengkak dua kali lipat. "Harga per kontainer melebihi Rp 50 juta yang biasanya di bawah Rp 20 juta, naiknya gila-gilaan membuat kita sulit ekspor," jelasnya

Begitu juga Ketua Umum Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki N. Hanafi menyebut rentang kenaikan ongkos kirim kontainer 200%-300%. Khususnya untuk kontainer berukuran 40 kaki, ke Australia, Eropa, Timur Tengah, juga Amerika Serikat.

Mebel Tiarap

Terpisah, Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan ekspor furnitur termasuk produk yang memakan tempat saat akan dikirim. Dengan kondisi sekarang dimana ruang kontainer itu sedikit turut memberatkan kegiatan ekspor furniture dan mebel Indonesia.

"Ruang kontainer langka, memicu harga pengiriman tinggi dan fantastis, naiknya berkali-kali lipat untuk tujuan Amerika," jelasnya. Dari semenjak awal tahun lalu, banyak pengusaha yang menunda pengiriman ekspor. Padahal 95% anggota HIMKI berorientasi pada pasar ekspor.

"Banyak yang menunda pengiriman karena perihal buyer berat untuk bayar ongkos kirim, perusahaan saya sendiri beberapa kali mengirim lewat udara. Beberapa kasus lewat laut itu rumit dan lambat," jelasnya.

Dia menjelaskan kontrak

pembelian biasanya dilakukan 3 - 6 bulan sebelum pembelian. Nah ekspor yang saat ini dilakukan hanya berdasarkan kontrak yang dibuat sebelumnya. Saat ini belum ada kontrak baru, walaupun permintaan tetap tinggi di pasar Amerika.

Abdul menjelaskan penundaan jadwal kapal juga sering terjadi, begitu juga dengan penundaan dari pembeli. Akibatnya barang harus menginap di pelabuhan. Membuat ongkos pengiriman semakin mahal karena harus menginap di pelabuhan, yang dibebankan kepada pembeli. Sehingga banyak terjadi penundaan pengiriman.

Jumlah kapal yang tersedia sedikit, membuat pelaku usaha berebut mendapatkan ruang dalam kontainer pengiriman. Belum lagi harus bersaing dengan sektor usaha lain, berat karena

produk furniture yang memakan banyak ruang.

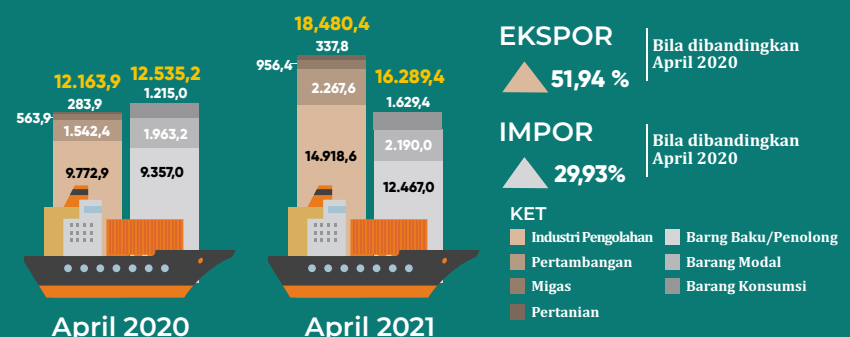
"Solusi harus dicari secepat mungkin terutama pemerintah soal kelangkaan ruang kapal ini, sebelumnya pandemi banyak kapal, tapi sekarang kapal yang bolak balik dengan muatan penuh jarang," jelasnya, walaupun belum bisa membeberkan berapa nilai kerugian.

Dengan adanya pandemi tentu semakin menekan UMKM yang bergerak pada industri mebel. Abdul mengatakan 70% anggotanya berbasis UMKM, hanya 30% yang menengah besar. Saat ditanya, Abdul menjelaskan kondisinya UMKM furniture kecil saat ini masih memprihatinkan.

"Ya megap-megap semua, ada permasalahan pengiriman kontainer, ditambah pandemi, kerugian pasti ada terutama yang modalnya kurang," jelasnya. (ist)

PERKEMBANGAN IMPOR DAN EKSPOR INDONESIA APRIL 2021*

Berita Resmi Statistik No. 38/05/Th.XXIV 20 Mei 2021



ESTIMASI HARGA PENGIRIMAN KONTAINER LAUT

Ke Eropa	Ke Amerika	Ke Australia
US\$ 8.500 untuk ukuran kontainer 40 kaki US\$ 6.000 untuk ukuran 20 kaki	US\$ 14.000 untuk ukuran 40 kaki US\$ 9.500 untuk ukuran 20 kaki	US\$ 4.200 untuk kurang dari 40 kaki US\$ 2.900 untuk ukuran 20 kaki.



HENRY WIRAWAN

*Pemuda RI Sukses Dirikan
Perusahaan Remitansi Digital*

Kreativitas anak muda Tanah Air di bidang start up memang tidak ada habisnya. Topremit, perusahaan remitansi mewakili Indonesia masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2021. Kisah pendirian perusahaan ini Henry Wirawan (CMO) yang berawal dari bisnis keluarga pun menginspirasi.

Sentuhan teknologi pada setiap aspek kehidupan memang bertujuan untuk memudahkan manusia. Dengan bantuan teknologi, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat masa kini menjadi lebih efektif dan efisien. Tak terkecuali pada bidang keuangan yang menumbuhkan sebuah inovasi baru. Salah satu pengaruh perkembangan teknologi di bidang keuangan saat ini adalah munculnya produk keuangan baru yang disebut fintech, yaitu merupakan jasa finansial yang menggunakan inovasi berupa fasilitas teknologi.

Salah satu startup fintech yang saat ini sedang populer di kalangan masyarakat adalah Topremi. Top Remit merupakan startup berbasis di Medan yang menyediakan layanan remitansi online berlisensi yang membantu mengirim uang dari Indonesia ke luar negeri melalui aplikasi web & seluler. Topremi telah mengantongi perizinan dari Bank Indonesia sebagai perusahaan 'Penyelenggara Transfer Dana'.

Ide inovatif tersebut muncul dari Henry Wirawan, alumni Sistem Informasi (SI) Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan dalam mendirikan sebuah perusahaan start up yang bergerak di bidang remitansi, yakni Topremi.

Topremi sendiri merupakan sebuah perusahaan remitansi asli Indonesia, tepatnya dari Medan yang berbasis fintech. Topremi menyediakan layanan remitansi online yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transfer

uang ke luar negeri melalui aplikasi web dan seluler.

Adapun perusahaan fintech tersebut menyediakan layanan remitansi yang memiliki sebuah keunggulan, yakni layanan remitansi praktis dan mudah tanpa pembatasan waktu dan dapat dilacak prosesnya secara real-time. Selain itu, biaya transfer melalui Topremi juga hanya dibebankan kepada pengirim sehingga uang akan diterima secara penuh tanpa potongan apapun.

Di Topremi, besaran minimal dana yang dapat ditransfer dapat dilakukan mulai dari Rp 45 ribu saja. Kemudian untuk biaya layanan transfer pun diklaim 87 persen lebih terjangkau dibanding metode remitansi konvensional. Biaya dan tarif pun dijamin transparansinya, sehingga apabila transaksi gagal, maka semua dana akan kembali kepada pengirimnya tanpa potongan apapun.

Adapun perihal keamanan dan legalitas Topremi sudah terjamin karena sudah memiliki lisensi dan pengawasan dari Bank Indonesia (BI) sebagai "Penyelenggara Transfer Dana" resmi. Hal inilah yang membuat perusahaan remitansi online tersebut banyak diminati oleh banyak kalangan.

Namun sebelum menjadi seperti ini, Topremi sendiri awalnya hanyalah perusahaan remitansi konvensional yang beroperasi secara offline milik keluarga Henry. Sudah berdiri pada 2009 silam, Topremi baru mengadopsi digitalisasi pada 2018 di tangan pemuda kelahiran 1997 tersebut. Saat itu, Topremi di masa konvensional hanya melakukan

transaksi pengiriman uang antar negara hanya antara Indonesia dan Malaysia.

Dengan bekal pengalaman belajar di bidang IT semasa kuliah, Henry bersama kakaknya, Hermanto Wie berhasil meluncurkan versi digital dari perusahaan keluarganya tersebut. Setahun kemudian, tepatnya pada Oktober 2019, Henry merilis aplikasi mobile Topremi dan langsung memperoleh penghargaan dari BI sebagai "Penyedia Jasa Pengiriman Uang Terbaik 2019." Aplikasi tersebut dapat diunduh di platform iOS dan Android.

Adapun Henry sebagai pendiri awalnya menjabat sebagai Chief Technology Officer (CTO) mengingat pengalamannya di bidang IT. Namun, ia merasa tidak nyaman terutama ketika berurusan dengan bidang coding. Maka ketika Topremi sudah memiliki departemen yang stabil, ia hijrah ke bidang kreatif dengan menjadi Chief Marketing Officer (CMO) yang ia jalani hingga kini.

Dalam setahun berdiri, Topremi sudah mencatatkan jumlah pengguna yang cukup banyak, yakni sekitar 14.700 pengguna. Begitu memasuki masa pandemi pada 2020, jumlah penggunanya justru meningkat signifikan hingga 250 persen, tepatnya sebanyak 66.200 pengguna. Tahun ini, penggunanya semakin meningkat mencapai 97.602 pengguna.

Adapun sejauh ini, Topremi sudah dipercaya untuk mengirimkan total transaksi lebih dari Rp 1,1 triliun per 2020. Angka tersebut kemudian meningkat mencapai Rp 2,03 triliun memasuki tahun 2021. Sasaran pengirimannya pun kini mampu hingga ke lebih dari 60 negara di benua Amerika Serikat, Asia, Eropa dan Australia. Jaringan ini pun akan terus diperluas oleh Topremi.

Keberhasilan tersebut sesuai dengan cita-cita Henry dan Hermanto, yakni untuk membantu mempermudah orang lain dalam melakukan pengiriman uang dari Tanah Air ke luar negeri. Masyarakat sendiri yang merupakan pengguna Topremi sudah merasakan manfaat Topremi dalam mengirimkan uang secara efisien dengan menghemat waktu, tenaga, transportasi, hingga biaya pengiriman.

Berkat inovasi dari kedua bersaudara tersebut dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, mereka berhasil didapuk untuk masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia tahun 2021 bersama dengan sejumlah anak muda Indonesia yang sukses di bawah 30 tahun lainnya.

"Kami sangat senang dan merasa terhormat dapat menjadi perwakilan Indonesia yang masuk ke dalam daftar prestisius Forbes 30 Under 30 di Asia. Penghargaan ini akan kami jadikan sebagai motivasi dan semangat baru, untuk terus mengedepankan layanan profesional dan keamanan dalam menangani pengiriman uang internasional," katanya melalui rilis.

Ia menambahkan, "Kami berterima kasih kepada semua pengguna yang telah mempercayai layanan Topremi, dan kami akan terus berinovasi untuk memberikan fitur dan bantuan yang lebih komprehensif".

Makin Diminati Saat Pandemi

Dalam waktu setahun, Topremi meluncurkan aplikasi mobile pada bulan Oktober 2019 dan mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai "Penyedia Jasa Pengiriman Uang Terbaik 2019".

Topremi menyediakan layanan pengiriman uang secara online yang lebih praktis, mudah, dan dapat dilacak secara real time. Biaya pengiriman uang juga dibebankan kepada pengirim, sehingga uang akan diterima secara penuh tanpa ada potongan. Dana yang bisa dikirim ke luar negeri yaitu mulai dari Rp 45 ribu saja.

Biaya layanan pengiriman uang melalui Topremi diklaim 87% lebih terjangkau dibandingkan dengan metode konvensional. Perusahaan juga menjamin transparansi biaya dan tarif, sehingga jika transaksi pengiriman gagal, maka semua dana akan dikembalikan ke pengirim tanpa potongan apapun. Topremi tersedia di platform web, iOS, dan Android ke lebih dari 60 negara di Asia, Australia, Inggris, dan Eropa.

Selama masa pandemi, Topremi mencatatkan kenaikan jumlah pengguna serta transaksi yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah penggunanya masih berkisar di angka 14.700, yang kemudian naik sebesar 250% menjadi 66.200. Mengawali tahun 2021 yang baru masuk ke bulan ke-4, pengguna perusahaan remitansi ini kembali meningkat sebesar 45% menjadi 89.800 pengguna.

Melalui platform online-nya, Topremi telah dipercaya untuk mengirimkan lebih dari Rp 1,1 triliun total transaksi sepanjang tahun 2020. Sementara itu, dalam waktu empat bulan pertama di tahun 2021, Topremi telah memfasilitasi total pengiriman uang hingga Rp 1,88 triliun. Pengguna utama Topremi adalah ekspatriat yang bekerja di Indonesia, orang tua pelajar di luar negeri, serta pelaku bisnis ekspor-impor.

"Layanan Transfer Internasional yang ada di aplikasi Topremi memudahkan pengguna dalam mengirimkan uang ke lebih dari 60 negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, hingga Australia. Untuk itu, Topremi berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi kami dengan para mitra di luar negeri, untuk membuka jalur-jalur remitansi ke berbagai negara lain," katanya.

Menurut Henry Wirawan, sejauh ini, tiga destinasi terpopuler untuk pengiriman uang dari Indonesia adalah: Filipina, Malaysia, dan India. Kakak-beradik ini menargetkan Topremi untuk bisa mencatatkan pertumbuhan jumlah pengguna hingga 100% di tahun berikutnya.

"Dengan peningkatan signifikan, artinya semakin banyak orang yang terbantu dengan layanan yang dihadirkan Topremi. Ini merupakan cita-cita kami, yaitu memberikan kemudahan dan kenyamanan pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri. Untuk ambisi jangka panjang, kami ingin terus meningkatkan sistem kami agar semua orang bisa mengirimkan uang antarnegara se gampang chatting," pungkasnya. (ist)



Foto: <https://kumparan.com/>

FAMILY

MAKANAN MEMBANTU CEGAH PERTUMBUHAN UBAN

Pertumbuhan uban dialami hampir semua orang seiring dengan pertambahan usia. Namun kita bisa mencegah atau memperlambat kemunculannya dengan menjaga pola makan.

Warna rambut ditentukan oleh produksi melanin seseorang. Rambut yang memutih membuktikan tingkat produksi melanin berkurang, salah satunya akibat penuaan. Sama seperti tanda penuaan lainnya, kita bisa melakukan sejumlah upaya untuk

menunda perubahannya. Misalnya saja dengan menjaga pola hidup dan jeli memilih asupan makanan yang dikonsumsi.

Ada beberapa jenis makanan yang mampu memberikan asupan vitamin dan mineral terbaik untuk mencegah pertumbuhan uban. Kita bisa membiasakan diri untuk menikmatinya warna rambut tetap terjaga. Berikut adalah lima jenis makanan yang paling direkomendasikan:

**JERUK**

Buah jeruk sudah dikenal mengandung banyak vitamin C yang kaya manfaat untuk tubuh.

Namun tak banyak yang menyadari kegunaannya untuk menjaga kilau dan warna asli rambut kita. Kelly Jones, ahli nutrisi di Philadelphia, Amerika Serikat menyarankan untuk rajin mengonsumsi jeruk sunkist dan mandarin untuk mendapatkan manfaatnya. "Jeruk ini adalah sumber vitamin C yang sangat penting dalam pengembangan protein kolagen, jaringan ikat yang membentuk sebagian besar tubuh, termasuk rambut," jelasnya.

vitamin B dan biotin. Kekurangan biotin menyebabkan perubahan warna dan kekuatan rambut, seperti membuatnya rapuh dan lebih rentan menipis. Karena itu penting untuk menjaga asupannya untuk menunda pertumbuhan uban.

**SALMON**

Salmon sangat direkomendasikan karena kaya vitamin D yang dapat menjaga pigmen rambut. Suplemen vitamin

D juga punya efek yang tak kalah baiknya, namun konsumsi ikan segar ini jauh lebih baik karena kaya manfaat tambahan seperti protein dan omega 3.

**TELUR**

Telur juga bermanfaat untuk kesehatan rambut karena kaya protein. Namun pastikan untuk menikmati

seluruh bagiannya termasuk kuning telur. Tujuannya untuk mendapatkan tambahan vitamin B12, nutrisi yang tidak didapatkan dari sumber

**MAKANAN YANG
DIFERMENTASI**

Makanan yang difermentasi mengandung prebiotik sehingga baik untuk sistem pencernaan.

Misalnya saja kimchi, tapai, taucu, dan yoghurt. Jones menjelaskan, usus yang sehat sangat penting untuk rambut karena bakteri organ tubuh ini menghasilkan

Foto : <https://id.fanpop.com/>

makanan nabati. Jika mengurangi konsumsi telur maka bisa digantikan dengan suplemen B12. Hal ini didasarkan pada riset tahun 2016 yang menunjukkan orang yang rambutnya memutih ketika masih muda cenderung memiliki status vitamin B12 yang rendah.

**COKELAT HITAM**

Cokelat hitam adalah sumber zat besi dan tembaga, dua nutrisi yang sangat baik untuk mencegah rambut beruban

dan penuaan. Tembaga berguna untuk produksi melanin yang mewarnai rambut, sedangkan kekurangan zat besi dapat memicu uban di usia dini. "Rendahnya feritin, lokasi penyimpanan zat besi dalam darah kita, telah dikaitkan dengan uban prematur dalam satu penelitian," kata Jones.

Ketika kita bertambah tua maka

produksi melanin berkurang sehingga konsumsi coklat hitam bisa jadi sumber tambahan untuk zat tembaga. Jadi tak ada salahnya sesekali menikmati makanan manis ini sebagai camilan maupun minuman. (ist)



JANGAN GAGAL PAHAM! INI BEDA TV ANALOG DAN DIGITAL

Proses Analog Switch off (ASO) atau migrasi dari siaran tv analog ke digital sudah dimulai. Lantas apa bedanya TV analog dengan digital? Penyiaran televisi digital terrestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF / UHF seperti halnya penyiaran analog, akan tetapi dengan format konten yang digital.

Dalam penyiaran televisi analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi signal akan makin melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Lain halnya dengan penyiaran televisi digital yang terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih sampai pada titik dimana signal tidak dapat diterima lagi.

Dengan siaran digital, kualitas gambar dan suara yang diterima pemirsa jauh lebih baik dibandingkan siaran analog, dimana tidak ada lagi gambar yang berbayang atau segala bentuk noise (bintik-bintik semut) pada monitor TV, tulis Kominfo dalam penjelasan resminya, dikutip Kamis (3/6/2021).

Pada era penyiaran digital, penonton TV tidak hanya menonton program siaran tetapi juga bisa mendapat fasilitas tambahan seperti EPG (Electronic Program Guide) untuk mengetahui acara-acara yang telah dan akan ditayangkan kemudian. Dengan siaran digital, terdapat kemampuan penyediaan layanan interaktif dimana pemirsa dapat secara langsung memberikan rating terhadap suara program siaran.

Migrasi tv analog ke digital tidak berarti masyarakat berpindah ke layanan streaming atau berlangganan TV kabel. Bukan pula harus membeli televisi baru. Masyarakat masih tetap menonton tayangan menggunakan televisi yang ada saat ini di siaran free to air atau gratis secara digital. Antena yang digunakan juga masih yang sama tak perlu diganti.

Untuk menikmati siaran televisi

masyarakat hanya perlu membeli Set Top Box (STB) yang harganya Rp 150.000 per unit. STB merupakan perangkat untuk menerima siaran digital yang dapat dihubungkan ke televisi. Sejauh ini terdapat 44,6 juta pesawat TV analog di tanah air.

Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia mengatakan migrasi ini bukan berarti streaming lewat handphone atau berlangganan. Semua konsepnya masih sama. "Antenanya masih sama, televisinya enggak usah ganti, perlu decoder sekitar Rp 150 ribu sekarang. Insya Allah akan lebih ekonomis lagi," ujarnya.

Adapun televisi digital adalah televisi yang sudah menggunakan Digital Video Broadcasting - Terrestrial second generation (DVB-T2) yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan migrasi tv analog ke digital akan rampung pada November 2022. Untuk tahap pertama prosesnya sudah dimulai. TV analog akan dimatikan di lima daerah paling lambat 17 Agustus 2021.

"Sekalipun siarannya digital, televisi yang lama tetap bisa digunakan kok. Cukup tambahkan Set Top Box (STB). Harga STB terjangkau serta mudah merangkainya dengan televisi," jelas Kominfo melalui akun Instagramnya. (ist)



Foto : <https://id.fanpop.com/>

**DAERAH
YANG TV ANALOG
AKAN DIMATIKAN
PALING LAMBAT
17 AGUSTUS 2021**

Aceh

(Kab. Aceh Besar Kota Banda Aceh),

Kepulauan Riau

(Kab. Bintan, Kab. Karimun, Kota Batam, Kota Tj. Pinang),

Banten

(Kab. Serang , Kota Cilegon, Kota Serang)

Kalimantan Timur

(Kab. Kutai Karta negara, Kota Samarinda, Kota Bontang),

Kalimantan Utara

(Kab. Bulungan, Kota Tarakan, Kab. Nunukan).

ADU GAYA **ARLOJI MEWAH** PEP GUARDIOLA VS THOMAS TUCHEL

Kita tidak akan membahas pertarungan sengit Chelsea dan Manchester City dalam final Liga Champions yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Chelsea. Tapi, tampaknya ada 'pertempuran' lain di sisi bangku pelatih.

Kedua manajer masing-masing klub, Thomas Tuchel dan Josep Guardiola memamerkan dua jam tangan yang keren. Guardiola menggunakan Richard Mille RM 010 AMC Automatic yang berbahan titanium dan berwarna biru muda. Warna jam tangan ini senada dengan jersey Manchester City.

Indikator angka pada jam tangan Guardiola itu bisa menyala dalam gelap (luminous), dan ditempatkan di atas dial safir. Pria yang akrab disapa Pep ini memiliki banyak koleksi Richard Mille, termasuk RM 010 AMC Automatic yang harga bekasnya bisa mencapai 175.000 dollar AS atau setara Rp 2,5 miliar di pasaran. Tidak mudah untuk mendapatkan jam tangan yang dipakai Pep, sebab Richard Mille hanya memproduksi jam tersebut sebanyak 30 unit.

Di sisi lain, Thomas Tuchel memilih jam tangan yang lebih 'merakyat', yaitu Hublot Classic Fusion. Khusus untuk Euro 2020 Hublot Classic Fusion dibekali casing titanium berdiameter 45 mm, dial bernuansa matte black dan tali karet hitam.

Tuchel sering terlihat memakai jam tangan ini selama memimpin anak asuhnya di musim 2020/2021.

Foto : <https://klikaktual.com/>

Rupanya, sejak tahun 2015, Hublot sudah bekerja sama dengan Chelsea, dan menjadi mitra jam tangan resmi klub yang bermarkas di London tersebut. Sebagai pria yang dilaporkan mendapat gaji pokok 8,5 juta euro atau sekitar Rp 148 miliar, Tuchel cenderung tidak neko-neko dalam

memilih jam tangan.

Soalnya, harga Hublot Classic Fusion di pasaran berada di kisaran angka 7.650 dollar AS (lebih kurang Rp 109 juta), jauh lebih murah ketimbang Richard Mille yang dipakai Guardiola. Namun, terlepas dari hal itu, kedua jam tangan yang dipilih Guardiola dan

Tuchel terlihat cocok di pergelangan tangan mereka. Berkat harga jam tangan yang lebih terjangkau, Tuchel seolah tidak memerlukan effort lebih untuk memaksimalkan penampilannya, seperti yang dilakukan Guardiola. Kamu suka penampilan siapa? (ist)

KOLEKSI MEWAH JAM TANGAN PEP

jam ini memiliki harga sebesar \$ 86.795 atau Rp 1.2 miliar.



RICHARD MILLE - THE RM 010 AUTOMATIC AMC BLUE WATCH IN TITANIUM

Jam tangan yang memiliki aksent warna biru muda ini merupakan salah satu koleksi paling langka dari Richard Mille yang hanya diproduksi sebanyak 30 buah. Untuk satu buahnya, ditaksir



RICHARD MILLE - THE RM 004 ALL GRAY

Jam tangan Richard Mille tipe The RM 004 All Gray ditaksir memiliki harga \$ 252.757 atau sekitar Rp 3,5 miliar.



RICHARD MILLE - THE RM27-01 RAFAEL NADAL IN WHITE QUARTZ AND BLACK CARBON

Jam yang satu ini bisa dibilang menjadi jam termahal yang dikenakan oleh Pep. Pada saat mendampingi Manchester City tanding melawan

Wolverhampton Wanderers di liga Inggris beberapa waktu lalu, pria kelahiran Spanyol ini terlihat memakai Richard Mille - The RM27-01 Rafael Nadal in White Quartz and Black Carbon. Jam tangan ini memiliki harga fantastis karena hanya diproduksi sebanyak 10 buah di dunia. Harga jam tangan ini ditaksir mencapai \$ 1,5 juta atau sekitar Rp 20 miliar.

Foto : <https://mlenews.com/>

Petaka Corona Inggris ... (dari hal 1)

Hingga Selasa (8/6) kondisi penyebaran Covid-19 di Bangkalan, Madura, Jatim belum reda. Menurut data, saat ini sedikitnya 322 warga terinfeksi dari sebelumnya hanya 12 orang saja.

Temuan terbaru Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair), ada mutasi Corona varian alpha (Varian B117 Inggris) dari sampel tes pasien asal Bangkalan. Pakar Imunologi Universitas Airlangga (Unair) Dr dr Agung Dwi Wahyu Widodo mengatakan penemuan varian alpha diungkapkan Direktur ITD Unair Prof Maria Inge Lusua.

"Jadi Unair punya ITD, di mana ITD berperan dalam diagnosis infeksi. Salah satu yang dilakukan genomic sequencing, untuk mendeteksi gen Covid-19. Virus dilakukan sequencing apakah ini virus baru apa lama," kata dr Agung saat dihubungi di Surabaya, Selasa (8/6).

"Jadi salah satu yang bisa kita dapatkan hasilnya, ada salah satu pasien yang dirawat yang berasal dari Bangkalan yang swabnya menunjukkan dia terinfeksi varian B117 UK atau oleh WHO sekarang disebut varian alpha," tambahnya.

Pria yang juga menjadi Dewan Pakar Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur ini menambahkan virus ini terkenal cukup ganas. Agung menyebut di Inggris, penularan virus ini bisa meningkat 40% hingga 90%.

"Ini menunjukkan jika suatu daerah teridentifikasi varian ini, menurut WHO maka kita harus bersiap-siap mendapatkan kasus yang cepat. Varian Alpha ini di Inggris saja dia mampu meningkatkan penularan 40% sampai 90% dalam waktu yang cepat, di Amerika doubling timenya dalam 10 hari. Kasus 100 menjadi 200 dalam waktu 10 hari," paparnya. Untuk itu, dia menyarankan agar dilakukan persiapan fasilitas isolasi hingga perawatan di rumah sakit. Karena, penyebaran virus ini cukup cepat.

Terpisah, epidemiolog Unair Dr. M. Atoillah Isfandiari, dr. M.Kes., mengatakan, bahwa sejak Januari 2021, sudah disampaikan akan ada kemungkinan varian-varian baru itu masuk ke Indonesia. Ato mengungkapkan, adanya varian baru yang jauh lebih mudah menular tersebut dapat dipengaruhi oleh mobilitas, terutama antara wilayah Bangkalan dan Surabaya. Dengan mobilitas tinggi, dapat memberikan risiko penularan tinggi pula untuk kedua wilayah tersebut.

Ditambah lagi, kemunculan varian baru diduga dibawa oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri yang kembali saat libur lebaran. Untuk mencegah adanya penyebaran virus, Ato menyebut, testing menjadi langkah dasar untuk mengetahui dan melacak masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Yang penting ditesting dulu, kalau ketemu yang positif diisolasi dan ditelusuri domisilinya. Maka daerah sekitar domisilinya itu yang diisolasi. Bisa jadi kalau dari testing itu ketemu positifnya merata dari berbagai kota di Pulau Madura pada akhirnya bisa mengarah pada ke karantina wilayah

pulau," jelasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Pelaksana Program Pendampingan Keluarga Pasien Covid-19 RSLI, Radian Jaidi. Sebanyak 25 dari 30 pasien Corona dari Madura yang dirujuk ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya, Jawa Timur, diduga mengidap jenis varian baru. "Secara umum, melihat cepatnya penularan, angka kematian yang tinggi, kondisi mereka patut diduga terinfeksi varian baru," ucapnya.

Hasil swab PCR 25 orang itu menunjukkan CT value (jumlah siklus yang dihasilkan dalam mencari materi genetik virus dari sampel) yang kurang dari angka 25. CT value di bawah 25, kata dia, berarti pasien tersebut patut diduga mengalami infeksi varian Covid-19 baru, sehingga dibutuhkan pemeriksaan sampel lebih lanjut. "Kami berupaya, memisahkan. Tetap kami usahakan atas dasar kemanusiaan, pasien yang biasa, harus dijauhkan kemungkinan paparan baru," ucap dia.

Warga Bangkalan Jangan ke Surabaya

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta warga Bangkalan tak ke Surabaya dulu. Hal itu dikatakan saat memantau pelaksanaan swab test bagi warga Bangkalan yang akan masuk ke wilayah Surabaya Selasa (8/6) di pos swab test Jembatan Suramadu. Menteri didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta rombongan.

Kehadiran menkes itu tidak hanya memantau. Dia memberi apresiasi kepada Gubernur Jatim, Wali Kota Surabaya, dan Bupati Bangkalan, yang kompak melakukan antisipasi penyebaran Covid-19. Dia meminta ketiga petinggi itu melakukan penanganan yang tepat. Sehingga, penyebaran virus Covid-19 tak menyebar ke daerah lain. "Saya terima kasih pada Bu Gubernur, Bupati, Pak Wali Kota karena sudah kompak. Saya percaya kalau ini bisa dikerjakan bersama-sama, harus bisa," tutur Budi.

Terpisah Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron menyampaikan bila data kasus Covid terhitung 10 April hingga 7 Juni 2021 kemarin meningkat di 4 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Sebab dari 12 kasus menjadi 322 kasus.

"Pasien Covid 19 tertinggi ada di



Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Surabaya, Selasa (8/6/2021).

Foto: Dokumentasi Istimedia

empat Kecamatan, yakni Kecamatan Arosbaya, Klampis, Geger dan Kecamatan kota," kata Bupati Bangkalan, dihadapan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito dan Anggota DPR-RI saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangkalan, Selasa (8/6).

Pria yang akrab disapa Ra Latif itu menambahkan, dampak lonjakan kasus Covid 19 di Bangkalan, pihaknya menyiapkan 178 tenaga medis dan 121 tenaga vaksinator serta penambahan ruang dan tempat tidur untuk pasien Covid di antaranya. Sebanyak 150 tempat tidur di RSUD Syarif Ambami Ratoh Ebu (Syamrabu) yang saat ini terpakai 93 pasien, 74 tempat di Balai Diklat terpakai 35 dan di Balai Latihan Kerja (BLK) 34 tempat tidur terpakai 17 pasien OTG. "Untuk penyekatan masih diberlakukan termasuk di penyebrangan Kamal dan akses masuk Suramadu sisi Madura," katanya.

Ada empat kecamatan di Bangkalan yang disebut sebagai episentrum

Covid-19. Tracing akan terus digencarkan oleh Pemkab di empat kecamatan tersebut. "Untuk itu kita lakukan tracing di empat kecamatan yang menjadi pusatnya. Yaitu Kecamatan Bangkalan, Arosbaya, Klampis dan Kecamatan Geger," kata Ra Latif.

Ra Latif juga mengingatkan warganya agar tidak takut dan khawatir saat dilakukan tes swab antigen dan swab PCR. Menurutnya, itu langkah untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari bahaya COVID-19.

Lebih lanjut Abdul Latif menyampaikan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tiga kabupaten lain di Madura, agar warga yang melintas di Bangkalan untuk pergi ke Surabaya, membawa surat bebas Covid-19.

"Bagi yang melintas ke Surabaya, saya sudah koordinasi dengan tiga kabupaten di Madura yang lainnya, Bupati Sampang, Pamekasan dan Sumenep agar warga yang akan melintas ke Surabaya, agar membawa surat kesehatan minimal rapid antigen. Agar tidak terjadi kemacetan yang panjang ini," tambahnya. (ist)

FAKTA MUTASI COVID-19 B.1.1.7 INGGRIS MASUK RI

LEBIH MENULAR

Ilmuan menyatakan varian baru B.1.1.7 30 hingga 70 persen lebih menular dari virus Corona Wuhan

MASIH AMPUH DENGAN VAKSIN

Vaksin Moderna, Pfizer, dan Novavax, mengklaim efektif 86-95 persen terhadap Virus B.1.1.7

ALAMI BANYAK MUTASI

Mutasi membuat Covid-19 lebih mudah menular karena terbukti mengubah sel lonjakan (Spike Protein) virus Corona sehingga lebih mudah masuk ke dalam sel manusia

MENYEBAR DI 94 NEGARA

B.1.1.7 pertama muncul di Inggris 20 September 2020. Kini sudah tersebar di 94 negara dengan 92 juta kasus

NOW!!!

Polemik TWK KPK

DIDUGA 51 PEGAWAI BAKAL DIPECAT 1 NOVEMBER



Petugas membersihkan gedung KPK yang saat ini terus 'memanas' akibat polemik TWK yang menyebabkan 75 orang pegawai tidak lolos dan 51 diantaranya terancam dipecat.

Jakarta-Semua pimpinan KPK diduga sepakat untuk memberhentikan 51 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 1 November 2021. Keputusan tersebut tertuang dalam berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen wawasan kebangsaan antara KPK bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait pada 25 Mei 2021.

"51 orang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK sampai dengan 1 November," demikian kutipan dokumen hasil rapat koordinasi yang didapat para jurnalis, Selasa (8/6).

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kelima pimpinan KPK. Mereka adalah Ketua KPK Firli Bahuri dan wakilnya Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufon. Selain itu, ada juga MenpanRB Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasona Laoly, Kepala BKN Haria Bima, Ketua KASN Agus Pramusinto, dan Ketua LAN Adi Surtanto yang menandatangani dokumen tersebut.

Rapat pada 25 Mei 2021 ini diketahui merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi mengenai nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Saat itu, Jokowi menyebut TWK hendaknya tidak menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai itu.

Surat juga memerintahkan 24 pegawai KPK yang masih bisa dilakukan pembinaan atau label "kuning" untuk mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan

selambat-lambatnya pada Juli 2021. Mereka juga diwajibkan menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan pelatihan dimaksud.

"Bagi yang telah selesai mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan dinyatakan lulus akan diangkat menjadi PNS. Bagi yang tidak lulus diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," bunyi surat tersebut.

Merespons dokumen tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mempertanyakan sumber dokumen tersebut. Komisar Jenderal polisi itu mengaku, akan mengecek ke Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa terlebih dulu. "Terima kasih saya cek ke Sekjen KPK," kata Firli Bahuri.

Tjahjo Dukung KPK Tak ke Komnas HAM

Langkah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memilih mangkir dari panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ternyata didukung Menteri Peningkatan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mempertanyakan keterkaitan urusan kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM. "Kami juga mendukung KPK misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM?" kata Tjahjo dalam raker dan RDP di Komisi II DPR, Selasa (8/6).

Tjahjo kemudian menceritakan ihwal penelitian khusus (litsus) saat dirinya masuk menjadi anggota DPR

tahun 1985. "Zaman saya Litsus tahun 1985 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas secara kompleks," ujar Tjahjo.

"Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia Litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya. Jadi memang data ASN memang sama," sambungnya.

Komnas HAM masih berharap pimpinan KPK yang diketuai Firli Bahuri dapat memenuhi panggilan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pada panggilan pertama Firli dan pimpinan lain tidak datang.

"Dalam beberapa hari ini nanti kami coba jadwalkan surat pemanggilan yang kedua (untuk pimpinan KPK)," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (8/6).

Anam mengatakan, panggilan dua kali sudah maksimal terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM. Menurutnya, panggilan tersebut justru sebagai kesempatan pimpinan KPK untuk memberikan keterangan.

Pt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaganya menghormati untuk panggilan terhadap pimpinan KPK. "Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut di dalam ketentuan yang berlaku saat ini," ucap Ali dikonfirmasi, Selasa (8/6).

Namun, kata Ali, pimpinan KPK

yang dikomandoi Firli Bahuri telah mengirimkan surat kepada Komnas HAM pada Senin (7/6/2021) kemarin. Tujuannya, untuk menanyakan pelanggaran hak asasi manusia apa yang dilanggar dalam TWK. "Pimpinan KPK telah berkir surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ungkap Ali.

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai, pimpinan KPK bersikap arogan dengan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. "Jelas ini bentuk arogansi KPK, nanti akan berbalik senjata makan tuan. Kalau nanti orang dipanggil KPK akan mengirim surat balasan untuk menjelaskan apa perkara korupsinya," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, di Jakarta, Selasa (8/6). (ist)

5 POIN DIDUGA MENJADI KESEPAKATAN TERKAIT HASIL TWK KPK

1. Pada tanggal 1 Juni 2021 bagi pegawai KPK yang telah dinyatakan memenuhi syarat menjadi ASN sejumlah 1.271 akan dilantik sebagai PNS.

2. Sebanyak 1.271 orang tersebut akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai PNS. Pembekalan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

3. Terhadap 75 orang yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN, diputuskan sebagai berikut:

- 24 orang akan mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.
- Peserta yang mengikuti pendidikan pelatihan bela negara wawasan kebangsaan, diwajibkan menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan pelatihan.
- 51 orang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK sampai dengan 1 November 2021.

4. Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya Juli 2021.

5. Bagi yang telah selesai mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan dan dinyatakan lulus akan diangkat menjadi PNS. Bagi yang tidak lulus diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

